



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022**



Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 serta sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju Tengah, 02 Januari 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) harus konsisten terus dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, telah ditetapkan 6 Misi

MISI

Misi adalah upaya umum yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Maksud dari perumusan misi adalah untuk menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan setiap kata kunci dari visi. Rumusan misi dan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SMP) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan Pendidikan, Kesehatan,



Pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan social. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

3. Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi ini Mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuat system agribisnis dan agroindustry berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi penghidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan social juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan public. Termasuk juga dalam misi ini penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

5. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang Heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mencakup pada mengacu pada nilai Lalla' Tassisara, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah.

Eksekutif Summary

Dari 10 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama, sebanyak 5 indikator dengan kategori “Sangat baik sekali” (nilai diatas 100 %), dan ada 2 indikator kinerja utama dengan kategori “Baik sekali” (Nilai 100%), dan 9 indikator kinerja utama dibawah 100% serta ada 1 indikator yang NA (NO ANSWER)

Upaya Strategis yang dilakukan Pemerintah daerah untuk terus meningkatkan seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
2. Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
3. Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
4. Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum.
6. Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
7. Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
8. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
9. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
10. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.

11. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
12. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
13. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Daerah..... 2

1.2.1 Permasalahan Pembangunan 2

1.2.2 Isu Strategis 2

1.2.2.1 Isu Internasional 2

1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasional 5

1.2.2.2.1 Profil Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah..... 6

1.2.2.3 Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Barat 2019 – 2024 9

1.2.2.4 Isu Strategis Kabupaten Mamuju Tengah 2016 – 2021 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 18

2.1.1 Visi 18

2.1.2 Misi 19

2.1.3 Tujuan dan Sasaran 21

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan..... 23

2.1.4.1 Arah Kebujakan..... 24

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 26

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 28

2.4 Perjanjian Kinerja 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32

3.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah..... 32

3.2 Capaian Kinerja Organisasi 32

3.3 Capaian Sasaran Strategis..... 33

3.4 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.....	35
3.4.1 Terpenuhiya Infrastruktur Dasar untuk Pemerataan Pembangunan.....	35
3.4.2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia.....	36
3.4.3 Terpenuhiya Standar Pelayanan Monumen (SPM) Kabupaten.....	39
3.4.4 Meningkatnya produktivitas dan Daya Serap Tenaga Kerja Sektor Perekonimian Daerah.....	40
3.4.5 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	43
3.4.6 Berkembangnya Kawasan Agropolitan Bebasis Kota Terpadu Mandiri.....	43
3.4.7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44
3.4.8 Berkembangnya Inovasi Daerah	45
3.4.9 Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.....	46
3.4.10 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah.....	47
 BAB IV PENUTUP	 52
 LAMPIRAN :	
1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Jumlah ASN menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020	11
Tabel 1.5.	Proyeksi Indikator Makro DaerahKabupaten Mamuju Tengah 2021-2026	12
Table 1.6.	Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020	14
Tabel 1.7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten MamujuTengah Tahun 2016-2019	16
Tabel 2.1.	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasara Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah	22
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026	26
Tabel 3.1.	Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif	33
Tabel 3.2.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022	34
Tabel 3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	35
Tabel 3.4.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia	37
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	39
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Serap Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	40
Tabel 3.7.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022	41
Tabel. 3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	43
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	44
Tabel 3.10.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	45
Tabel 3.11.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Berkembangnya Inovasi Daerah	46

Tabel 3.12.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	47
Tabel 3.13.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	48
Tabel 3.14.	Capaian Tahun 2022 Dibandingkan Target Rpjmd 2022	49
Tabel.3.15.	Realisasi Anggaran	50

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

1.2.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis menjadikannya sebagai suatu tantangan dan ancaman terhadap pelaksanaan pembangunan. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dandinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional.

1.2.2 Isu Strategis

1.2.2.1 Isu Internasional

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni :

1. mengakhiri kemiskinan;
2. mengatasi dan menekan kesenjangan; dan
3. mengatasi perubahan iklim.

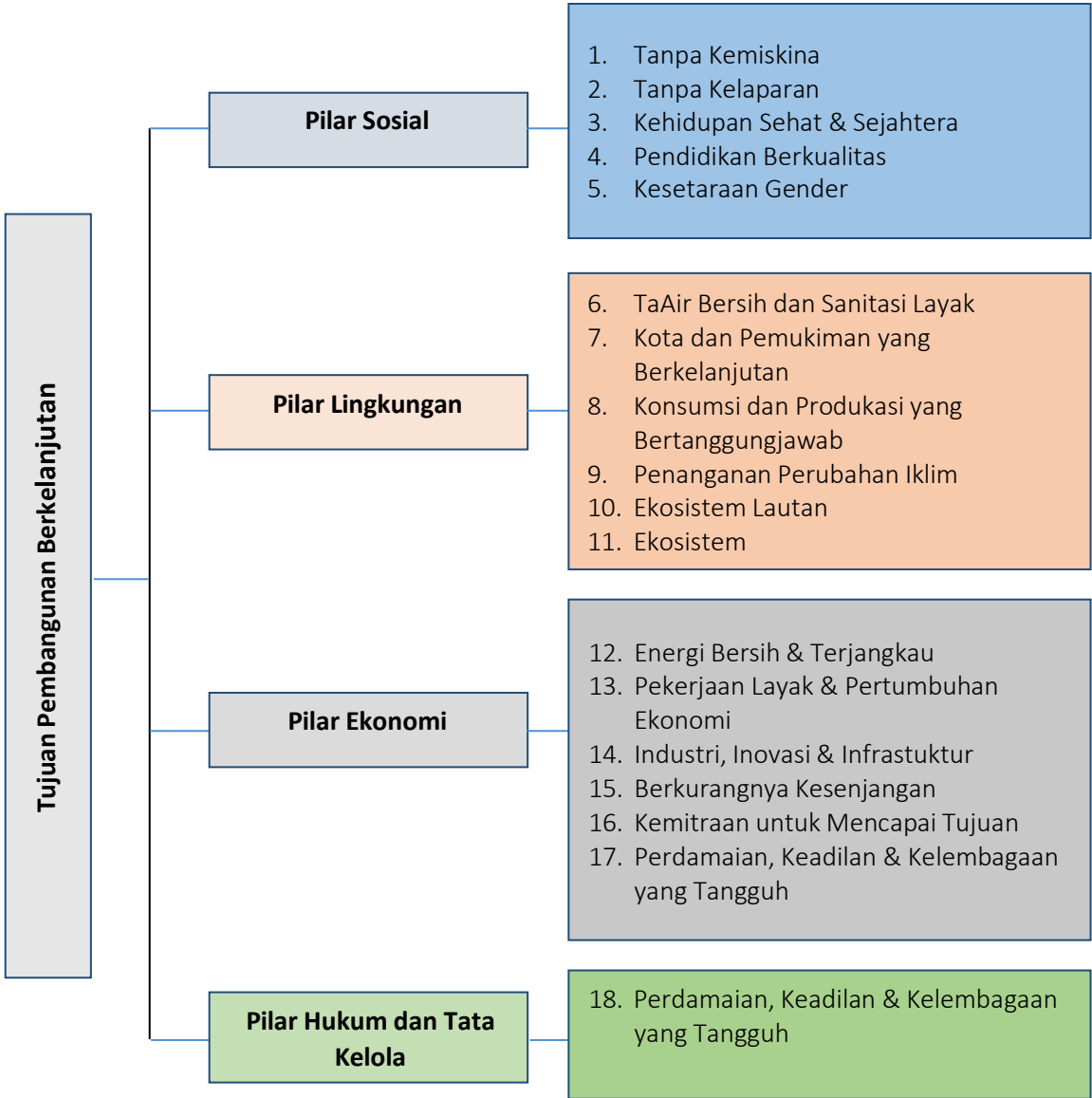
Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, maka terdapat 17 tujuan global yakni sebagai berikut :



- a) Mengakhiri Kelaparan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat
- b) Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelapran, mencapai ketahan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- c) Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
- d) Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- e) Kesenjaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
- f) Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- g) Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
- h) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
- i) Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- j) Berkurangnya Kesenjangan: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- k) Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
- l) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

- m) Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- n) Ekosistem Laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o) Ekosistem Darat: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- q) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka DNA SDGs harus padat diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasional

A. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

B. RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan antara lain:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.]
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, dirumuskan sembilan agenda pembangunan nasional. yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2) Menegembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Pofil Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah

Mamuju Tengah Merupakan Hasil Pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 digedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah adalah Tobadak, Secara Administrasi, Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah terbagi atas 5 Kecamatan, yaitu : Pangale, Budong-budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa.
Dan Terdiri dari 33 Organisasi Perangkat Daerah dgn Jumlah ASN sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan Occupation	2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu Specific Functional	559	800	1359
Fungsional Umum/Staf General Functional	142	86	228
Struktural/Structural			
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-
Eselon IV/4 th Echelon	45	43	88
Eselon III/3 rd Echelon	102	29	131
Eselon II/2 nd Echelon	25	1	26
Eselon I/1 st Echelon	-	-	-
Jumlah/Total	873	959	1832

Jabatan <i>Occupation</i>	2022		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu <i>Specific Functional</i>	605	962	1567
Fungsional Umum/Staf <i>General Functional</i>	129	101	230
Struktural/ <i>Structural</i>			
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-
Eselon IV/4 th Echelon	42	40	82
Eselon III/3 rd Echelon	100	28	128
Eselon II/2 nd Echelon	27	4	31
Eselon I/1 st Echelon	-	-	-
Jumlah/ <i>Total</i>	903	1135	2038

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamuju Tengah /Civil Service Agency in Mamuju Tengah Regency

Tabel 1.2 Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2021		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	-	-	-
SMP/Sederajat <i>General Vocational Junior High School</i>	-	-	-
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	70	43	113
Diploma I, II/Akta I, II <i>Diploma I, II/Akta I, II</i>	11	8	19
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda <i>Diploma III/Akta III/Bachelor</i>	44	171	215
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D/University <i>Graduates</i>	748	737	1485
Jumlah/ <i>Total</i>	873	959	1832
Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2022		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	-	-	-
SMP/Sederajat <i>General/Vocational Junior High School</i>	-	-	-
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	69	47	116
Diploma I, II/Akta I, II <i>Diploma I, II/Akta I, II</i>	11	11	22
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda <i>Diploma III/Akta III/Bachelor</i>	43	163	206
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D/University <i>Graduates</i>	780	914	1694
Jumlah/ <i>Total</i>	903	1135	2038

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamuju Tengah /Civil Service Agency in Mamuju Tengah Regency

Tabel 1.3Jumlah ASN menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-
3. I/C (Juru)	-	-	-
4. I/D (Juru Tingkat I)	-	-	-
Golongan I/Range I			
5. II/A (Pengatur Muda)	17	5	22
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	14	13	27
7. II/C (Pengatur)	41	59	100
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	19	74	93
Golongan II/Range II			
9. III/A (Penata Muda)	210	285	495
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	183	176	359
11. III/C (Penata)	77	93	170
12. III/D (Penata Tingkat I)	103	97	200
Golongan III/Range III			
13. IV/A (Pembina)	97	82	179
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	96	73	169
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	16	2	18
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	-	-	-
17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Golongan IV/Range IV			
Jumlah/Total	873	959	1832

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2022		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-
3. I/C (Juru)	-	-	-
4. I/D (Juru Tingkat I)	-	-	-
Golongan I/Range I			
5. II/A (Pengatur Muda)	9	1	10
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	12	14	26
7. II/C (Pengatur)	30	40	70
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	23	79	102
Golongan II/Range II			
9. III/A (Penata Muda)	204	296	500
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	194	179	373
11. III/C (Penata)	58	88	146
12. III/D (Penata Tingkat I)	103	100	203
Golongan III/Range III			
13. IV/A (Pembina)	98	78	176
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	88	71	159
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	17	1	18
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1
17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Golongan IV/Range IV			
18. IX (PPPK)	66	188	254
Jumlah/Total	903	1135	2038

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamuju Tengah /Civil Service Agency in Mamuju Tengah Regency

1.2.2.3 Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Barat 2019 – 2024

Permasalahan Pembangunan

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan.

1.2.2.4 Isu Strategis Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Isu strategis adalah factor-faktor yang dianggap penting dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di masa datang. Isu strategis tersebut dapat bersumber dari isu internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi ataupun dari permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis kabupaten mamuju Tengah adalah sebagai berikut.

Isu-Isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun ke depan bersumber dari pandemic Covid-19, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Isu-Isu Tersebut teridentifikasi sebagai Berikut:

1. Penghapusan Kemiskinan
2. Pelayanan Kesehatan yang inklusif
3. Pelayanan Pendidikan yang inklusif
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
7. Kesempatan kerja yang inklusif
8. Infrastruktur yang Tangguh
9. Industry yang inklusif
10. Ketimpangan ekonomi
11. Perumahan dan pemukiman
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan
13. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
14. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
15. Degradasi hutan dan lahan sarta keanekaragaman hayati
16. Masyarakat inklusif dan harmonis

17. Penangan dampak pandemic Covid-19

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Isu-isu regional provinsi bersumber dari RPJMD Provinsi, terutama yang terkait dengan program prioritas Gubernur yakni:

1. Pengembangan Trans-Sulawesi
2. Program Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas

Isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia
2. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah
3. Kemiskinan dan kesenjangan
4. Pembangunan pertanian, agribisnis dan agropolitan
5. Pengembangan UMKM
6. Perbaikan pelayanan publik
7. Tatakelola pemerintahan yang baik
8. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
9. Penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
10. Penguatan jalur logistik barang dan jasa unggulan daerah
11. Penguatan pemerintahan kecamatan
12. Pembangunan desa
13. Fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan

Berdasarkan identifikasi dari level global, nasional, provinsi dan daerah tersebut diatas, terdapat rumusan isu yang berbeda tetapi substansinya sama, sehingga diperlukan rumusan yang menggabungkan substansi yang relatif sama tersebut. Dengan demikian, hasil identifikasi isu strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut.

1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan
2. Pelayanan kesehatan

3. Pelayanan pendidikan
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
7. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
8. Pengurangan ketimpangan ekonomi
9. Pembangunan infrastruktur dasar
10. Pembangunan perumahan dan pemukiman
11. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
12. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
15. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
16. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
17. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
18. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
19. Perbaikan sistem pelayanan publik
20. Komunikasi, informasi dan teknologi digital
21. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
22. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
23. Pemberdayaan masyarakat
24. Penguatan pemerintahan kecamatan
25. Penguatan ketahanan desa
26. Penanganan dampak pandemik Covid-19

1.) Struktur Penduduk menurut Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 terlihat angka tertinggi terdapat pada jumlah penduduk yang belum sekolah sebesar 46.400 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebesar 6 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 138.130 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan KabupatenMamuju Tengah Tahun 2016-2020

Tahun						
No	Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belum Sekolah	35.210	37.291	46.764	48.552	46.400
2	Belum Tamat SD	25.717	24.955	23.051	21.306	18.922
3	Tamat SD	41.755	41.587	36.166	34.066	33.012

Tamat SMP	19.197	19.101	17.518	16.746	16.598
Tamat SMA	15.943	16.350	16.893	16.892	17.133
Tamat Diploma	1.643	1.682	1.730	1.737	1.757
Tamat S1	2.575	2.871	3.477	3.847	4.070
Tamat S2	89	101	150	120	132
Tamat S3	10	8	7	6	6
142.139	143.946	145.756	143.272	138.130	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah Tahun 2021

2.) Asumsi Makro dan Sosial Daerah

Guna memproyeksi kondisi masa depan keuangan daerah, khususnya menyangkut kerangka pendanaan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran diperlukan asumsi makro ekonomi dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah bersangkutan. Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per kapita,(3) tingkat inflasi, (4) tingkat pengangguran terbuka, (5) Indeks Pembangunan Manusia, (6) tingkat kemiskinan sert (&) Rasio Gini) yang menjadi faktor determinan dalam capaian kinerja keuangan daerah untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam perspektif peningkatan penerimaan daerah, baik berupa pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, asumsi makro ekonomi dan sosial daerah merupakan potensi dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah diharapkan selalu membaik karena bukan hanya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi juga diharapkanmenjadi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang baik. Dengan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, disertai dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, maka kemampuan dan kapasitas keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, dalam perspektif pengeluaran dan belanja daerah, asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang ditetapkan akan berimplikasi pada tingginya kebutuhan fiskal daerah. Pada sisi yang lain, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk tahun-tahun berikutnya.

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pengeluaran pembiayaan dan belanja daerah, yang pada tahapan selanjutnya diharapkan dapat menciptakan sumber-sumber peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selengkapnya asumsi-asumsi tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Proyeksi Indikator Makro DaerahKabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

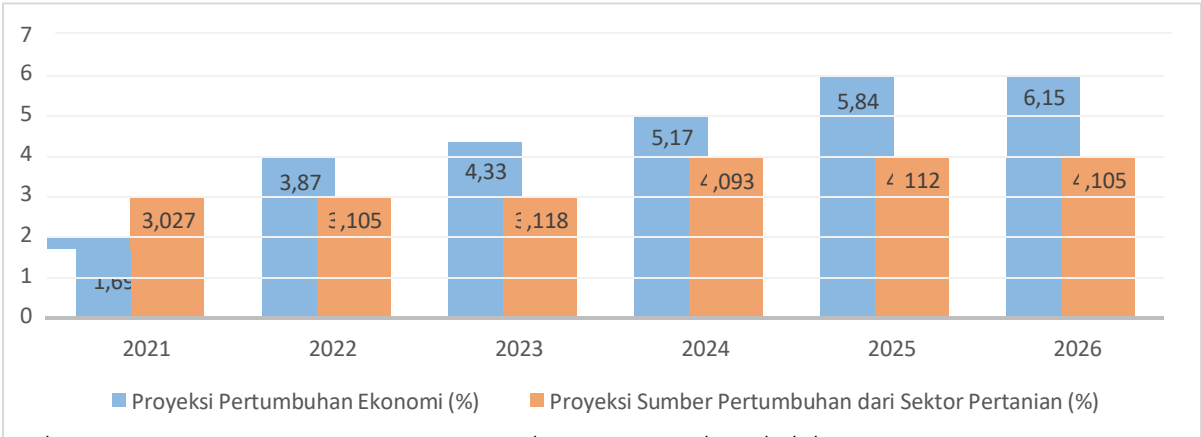
No	Indikator Makro Daerah	Baseline	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	-0,40	1,69	3,87	4,33	5,17	5,84	6,15
2	PDRB Per Kapita	23,57	24,18	25,86	26,51	27,16	28,67	29,21
3	Inflasi	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
4	TPT	2,71	2,62	2,53	2,52	2,48	2,45	2,44
5	IPM	65,71	66,34	67,00	67,14	67,40	67,60	67,69

6	Tingkat Kemiskinan	6,79	6,76	6,30	6,13	5,84	5,61	5,50
7	Rasio Gini	0,314	0,341	0,367	0,375	0,356	0,345	0,339

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun, 2021

Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan akan terus membaik, dengan mengandalkan sumber pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian yang terbukti mampu tetap bertumbuh pada saat sektor lainnya terdampak Pandemi COVID-19, pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan diharapkan akan semakin akseleratif melalui kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustry.

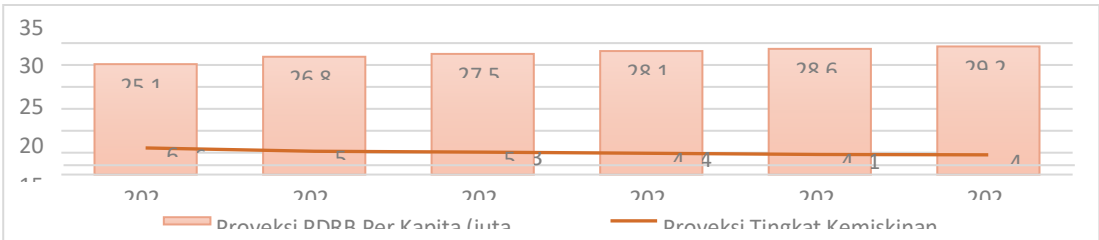
Gambar1.1.Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026



Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

PDRB per kapita diprediksi akan terus membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang stabil di angka 2,5 %1, tingkat inflasi yang stabil disekitaran 2,0% selama periode sebelumnya mampu tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu tetap menekan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan juga diprediksi akan terus menurun selama periode 2021-2026. Tahun 2021-2026

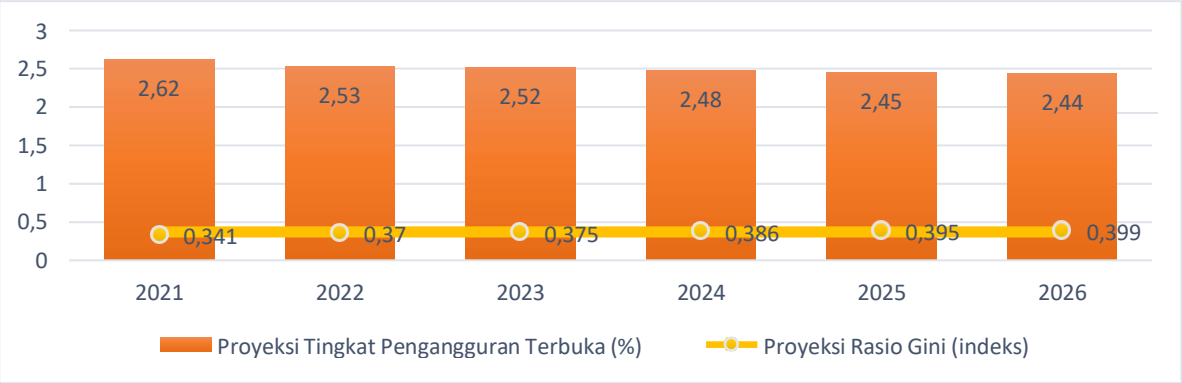
Gambar 1.2. Tingkat Kemiskinan



Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

Pengembangan agribisnis dan agroindustri yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan akan berdampak tumbuhnya investasi dalam skala kecil dan menengah pada sektor UMKM berbasis pertanian/perikanan, baik diperdesaan maupun yang bercirikan perkotaa, bukan hanya diharapkan mampu mereduksi ketimpangan pendapatan masyarakat, tetapi juga akan menyerap tenaga kerja yang *labor intensive* sehingga terus akanmenurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Gambar 1.3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

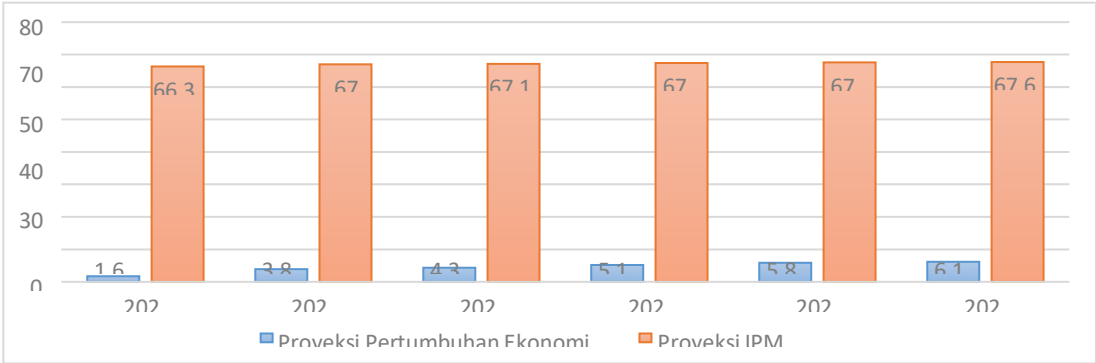


Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

Peningkatan Rasio Gini selama periode 2021-2024 merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi akseleratif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, dan angka Rasio Gini akan kembali menurun meningkatnya pendapatan per kapita kelompok masyarakat bawah yang didorong oleh penurunan TPT (penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian/perikanan dan UMKM).

IPM diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan konsisten mengalami peningkatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, sehingga akses layanan Pendidikan dan kesehatan juga meningkat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat. Gambar 1.4. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026

Gambar 1.4. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026



Sumber: Tim Penyusun RPJMD Mamuju Tengah 2021-2026, data diolah

Table 1.6. Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
A	Pertanian	1,751,199.40	29,1	1,896,277.40	28,9	2,121,943.50	31,7	2,248,458.00	34.9	2.287.513,1	33,9
B	Pertambangan dan Penggalian	31,616.40	0,53	32,833.20	0,50	35,403.20	0,52	36,927.40	0.57	36.062,0	0,53
C	Industri Pengolahan	193,315.80	3,21	216,283.90	3,29	236.092,1	3,52	267,653.30	4.16	271.056,3	4.0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	310.00	0,005	358.3	0,005	378.10	0,005	385.3	0.005	401,5	0.006

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,383.80	0,02	1,493.30	0,02	1,576.60	0,02	1,747.60	0.03	1.792,4	0,03
F	Konstruksi	36,342.50	0,60	39,455.40	0,60	42,293.80	0,63	44,630.80	0.70	41.176,7	0,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,588.10	1,95	125,285.70	1,91	134,021.00	2,00	139,696.90	2.17	138.243,3	2,05
H	Transportasi dan Pergudangan	15,728.00	0,26	16,171.50	0,25	16,750.20	0,25	18,290.00	0.28	17.817,2	0,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,942.90	0,08	5,193.50	0,08	5,569.90	0,08	6,065.50	0.09	5,950,6	0.09
J	Informasi dan Komunikasi	25,520.50	0,42	27,425.20	0,42	29,462.10	0,44	31,510.10	0.49	33.488,1	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,824.60	0,35	23,788.40	0,36	25,684.50	0,38	26,851.30	0.42	28.850,5	0,43
L	Real Estate	87,478.20	1,45	93,546.20	1,43	95,885.10	1,43	100,113.00	1.56	102.115,3	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	342.10	0,005	352.80	0,005	363.80	0,005	377.10	0.005	362,8	0,005
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	103,587.00	1,72	106,154.60	1,62	109,785.90	1,63	112,887.70	1.76	101.991,3	1,51
P	Jasa Pendidikan	83,930.20	1,40	95,927.40	1,46	101,055.80	1,50	106,685.60	1.66	104.221,8	1,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,492.30	0,12	7,943.90	0,12	8,522.70	0,12	89,226.90	1.38	9.051,8	0,13

3.) Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun

sektoral dari tahun ketahun. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 menurun dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah -0,40 persen. Hampir seluruh sektor ekonomi yang ada pada PDRB pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang negatif. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dihasilkan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,74 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten MamujuTengah Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2016		2017		2018		2019*		2020**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,308,010.0	3,29	1,381,382.8	5,61	1,466,185.5	6,14	1,549,311.0	5,67	1.562.880,9	0,88
2	Pertambangan dan Penggalian	24,528.1	9,63	25,408.3	3,59	26,996.4	6,25	27,815.4	3,03	26.628,5	-4,27
3	Industri Pengolahan	167,892.7	-9,48	177,862.6	5,94	194,270.9	9,23	216,448.8	11,42	210079,2	-2,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	428.9	19,24	462.8	7,91	488.0	5,43	514.6	5,47	532	3,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Daur Ulang	1,193.4	6,25	1,287.4	7,88	1,357.4	5,44	1,488.0	9,62	1.522,7	2,38
6	Konstruksi	28,989.0	16,25	30,497.3	5,20	31,747.3	4,10	33,073.8	4,18	29.667,3	-10,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobildan Sepeda	83,197.8	4,87	86,013.4	3,38	89,517.6	4,07	92,669.8	3,52	90.385,8	-2,46
8	Transportasi dan Pergudangan	12,882.4	0,76	13,168.8	2,22	13,592.0	3,21	14,611.1	7,50	13.971,3	-4,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,879.0	9,06	3,922.6	1,12	4,159.1	6,03	4,517.3	8,61	4.284,1	-5,16
10	Informasi dan Komunikasi	23,021.8	10,68	24,174.2	5,01	25,424.2	5,17	27,005.4	6,22	29.025,4	7,48

Sumber : Sumber : BPS, Mamuju Tengah Dalam Angka, Tahun 2021

4.) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); Peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).

Saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam delapan area perubahan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah mempertahankan kondisi ini atau bahkan semakin meningkat.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 2



2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2022

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu - isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Mamuju Tengah dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H. Aras Tammauni (Bupati) – H. Amin Jasa (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021- 2026 sebagai berikut: “KABUPATEN MAMUJU TENGAH MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI LALLA’TASSISARA”

Penjelasan dari Visi sebagai berikut :

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera, dan bingkai *La'la' Tassisara*. Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut.

“Maju” adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya.

“Sejahtera” adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Bingkai *La'la' Tassisara*” adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.

Dengan visi tersebut, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicitacitakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.

2.1.2 Misi

Misi adalah upaya umum yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Maksud dari perumusan misi adalah untuk menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan setiap kata kunci dari visi. Rumusan misi dan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

(1) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

(2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan

sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

(3) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuat sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi kehidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

(4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa.

(5) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai *Lalla' Tassisara*, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

(6) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah. Masing-masing misi diarahkan untuk mempunyai kontribusi dominan terhadap kata kunci tertentu dari visi. Kata kunci “maju” dikontribusi oleh Misi-1 yakni “Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar”, Misi-2 yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar”, dan Misi-4 yakni “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”. Kata kunci “sejahtera” dikontribusi oleh Misi-3 yakni “Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah” dan Misi 6 yakni “Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup”. Kata kunci *Lalla' Tassisara* dikontribusi oleh Misi-5 yakni “Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat”.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun RPJMD. Kriteria rumusan tujuan pembangunan adalah: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian

dengan program kepala daerah terpilih; 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah perumusan sasaran adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; 2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMDberkenaan; dan 3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJM

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

MISI		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Mendorong pemenuhan Infrastruktur dasar	1	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah	Rasio gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan)	1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks daya saing Infrastruktur
II	Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar	1	Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas kehidupan manusia	1	Indeks pembangunan manusia (%)
					2	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten	2	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar (%)
III	Mendorong daya saing perekonomian daerah	1	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	PDRB/Kapita ADHB	1	Meningkatkan Produktivitas dan daya serap tenaga kerja sector-sektor Perkonomian daerah daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi
					2	Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	2	Tingkat Pengangguran Terbuka
					3	Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	4	Angka Kemiskinan
IV	Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah	2	Nilai LPPD
					2	Berkembangnya inovasi daerah	3	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)
							4	SAKIP
							5	Opini BPK
								Indeks SPBE
							1	Indeks Inovasi Daerah

V	Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat	1	Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum	Indeks Kriminalitas	1	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	Persentase penurunan gangguan ketertiban gangguan ketertiban dan keamanan
VI	Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Predikat daya dukung lingkungan	1	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	1 2	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, strategi dipahami sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi adalah 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah dalam mencapai setiap sasaran; 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Langkah-langkah ini dilakukan oleh tim melalui sejumlah diskusi dan penyiapan kertas kerja. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka strategi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut.

14. Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
15. Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
16. Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
17. Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.

18. Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum.
19. Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
20. Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
21. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
22. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
23. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.

2.1.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan melalui Peraturan BupatiMamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah KabupatenMamuju Tengah. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	$(BxN \text{ kemandapan jalan kabupaten} + BxN \text{ ketersediaan marka jalan} + BxN \text{ Akses Air Minum Layak} + BxN \text{ Akses Sanitasi Layak} + BxN \text{ Pemukiman layak huni} + BxN \text{ Rumah Layak Huni} / 6) \times 100\%$	Laporan Kinerja Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	$(BxN \text{ Angka Rata-rata Lama Sekolah} + BxN \text{ Angka Harapan Lama Sekolah} + BxN \text{ Angka Harapan Hidup} + BxN \text{ Pengeluaran Perkapita} / 4) \times 100\%$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		3	Prevalensi Stunting	Persen	$PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Dimana: PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)SPstunting : jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : jumlah anak balita pada waktu yang sama	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten	4	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar	Persen	$rerata \text{ SPM} = \frac{\sum B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6}{6}$ Dimana: B ₁ = capaian SPM Bidang Pendidikan (%) B ₂ = capaian SPM Bidang Kesehatan (%) B ₃ = capaian SPM Bidang PU (%) B ₄ = capaian SPM Bidang Perumahan (%) B ₅ = Bidang Ketenteraman dan Ketertiban(%) B ₆ = Bidang Sosial (%)	Laporan kinerja OPD penyelenggara SPM
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	5	Pertumbuhan ekonomi	Persen	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $R_{(t-1,t)}$ =laju pertumbuhan ekonomi (%) $PDRB_t$ = Jumlah PDRB tahun t (Rp)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
					$PDRB_{t-1}$ = Jumlah PDRB tahun t-1 (Rp)	
		6	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	7	Angka kemiskinan	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ Dimana: α= 2 z= garis kemiskinan y= Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i= 1,2,3,...,q), y<z q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
6	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	8	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	Persen	$P_n = \frac{QX_n}{QX_n} \times 100\%$ Dimana: P _n = Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%) QX _n = PDRB total (Rp) QX _n = PDRB sector Pertanian (Rp) n = tahun (periode) tertentu	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	9	Nilai LPPD	Nilai		
		10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	$IPKD = \sum D1, D2, D3, D4, D5, D6$ Dimana: D1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (6,66) D2 = Pengalokasian anggaran belanja dana APBD (20) D3 = Transparansi pengelolaan keuangan (5,955) D4 = Penyerapan Anggaran (20) D5 = Kondisi Keuangan Daerah (5,43) D6 = Opini BPK(15)	Litbang Provinsi Sulawesi Barat
		11	SAKIP	Nilai Indeks	$SAKIP = \sum K_1, K_2, K_3, K_4, K_5$ Dimana: K ₁ = Perencanaan kinerja (30%) K ₂ = Pengukuran Kinerja (25%) K ₃ = Pelaporan Kinerja (15%)	KemenPAN RI

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
					$K_4 = \text{Evaluasi Internal (10\%)}$ $K_5 =$	
		12	Opini BPK	Kategori		Hasil Opini BPK
		13	Indeks SPBE	Nilai Indeks	$\text{Indeks SPBE} = \sum \text{Nilai Indeks Domain} \times \text{Bobot Domain}$	Laporan Kinerja Dinas Kominfo
8	Berkembangnya inovasi daerah	14	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ Dimana: Skor total maksimum adalah 250 Skala IID adalah 0 s.d 100	Litbang Kemendagri
9	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	15	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	Persen	$PG\ K3 = \frac{GK3_{n-1} - GK3_n}{GK3_{n-1}} \times 100\%$ Dimana: PG K3 = Penurunan gangguan K3 $GK3_{n-1}$ = Jumlah gangguan K3 tahun sebelumnya $GK3_n$ = Jumlah gangguan K3 tahun ini	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	16	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Persen	$IKLHD = \text{IKA} + \text{IKU} + \text{IKL} \times 100\%$ Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	Persen		

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 ada pada Lampiran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1		
TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	%	74.8

Sasaran Strategis 2		
MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MANUSIA		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Indeks Pembangunan Manusia	%	67.00
Prevelensi Stunting	%	8.00

Sasaran Strategis 3		
TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Rata-rata Capaian SPM Pelayanan Standar	%	100

Sasaran Strategis 4		
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SERAP TENAGA KERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi	%	3.87
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.53

Sasaran Strategis 5		
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOCIAL MASYARAKAT		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Angka Kemiskinan	%	6.30

Sasaran Strategis 6		
BERKEMBANGNYA KAWASAN AGROPOLITAN BERBASISI KOTA TERPADU MANDIRI		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Kontribusi Sektor Pertanian Dalam PDRB	%	71.30

Sasaran Strategis 7		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Nilai LPPD	%	2.79
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)		C
Nilai SAKIP		CC
Opini BPK		WTP
Indeks SPBE		1.8

Sasaran Strategis 8		
BERKEMBANGNYA INOVASI DAERAH		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Indeks Inovasi Daerah		Kurang inovatif

Sasaran Strategis 9		
TERPELIHARANYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Dan Ketenteraman	%	60

Sasaran Strategis 10		
TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	75.00
Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca		3

- Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.454.251.858.015



3.1

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DAERAH KAB. MAMUJU TENGAH

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Mamuju Tengah tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, Rencana kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tersebut.

3.2

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan Pelaporan Kinerja yang di dalamnya tertuang pengukuran capaian kinerja. Capaian sasaran program Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 ini merupakan pengukuran kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dengan standar

pengukuran yang sesuai berdasarkan sasaran, indikator, indikator dan target yang telah ditetapkan serta dilakukan analisa yang mendalam untuk mengetahui tingkat capaian program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indlktor Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan, akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat sebagai acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus:
- $$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus:
- $$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program.

Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

No	Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	63	52	82,53
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia	67,00	66,89	99,8
		Prevelensi stunting	8%	14,69%	16,37
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	100	95,78	95,78
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	3,87	2,20	56,8
		Tingkat pengangguran terbuka	2,53	1,88	125,69
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	6,30	7,17	86,19
6	Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	71,30	73,07	100,29
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3	2,79	93
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	C	-	NA
		Nilai SAKIP	C	CC	112
		Opini BPK	WTP	WTP	100
		Indeks SPBE	1,8	1,83	102
8	Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kurang Inovatif	Inovatif	100

Capaian Kinerja belum mencapai target karena

- 1) Masih terbatasnya dana (dukungan APBD) dalam menunjang pembiayaan Program dan Kegiatan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- 2) Jaringan Perpipaan masih Kurang dan Sulit mendapatkan sumber air bersih yang memadai
- 3) Jangkauan akses jalan ke areal pembangunan fisik sangat minim akibat kerusakan yang terjadi karena cuaca (curah hujan yang tinggi), yang mengakibatkan transportasi material ke lokasi kurang lancar karena kondisi medan yang sulit dan hal ini juga mengakibatkan adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
- 4) Akses alat berat tidak efisien menjangkau lokasi pekerjaan
- 5) Terbatasnya koordinasi sebelum pekerjaan dimulai
- 6) Oprit/timbunan kurang padat, hasil mix beton yang terpasang mutunya rendah sehingga tidak tercapai karakteristik hasil pekerjaan yang diharapkan
- 7) Kurangnya inovasi dari pihak rekanan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur Daerah yaitu Lebih meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, melanjutkan Pembangunan infrastruktur Daerah menjadi program prioritas Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia

Keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia” diukur dengan dua indikator kinerja utama berupa “Indeks pembangunan manusia” dan “Prevelensi stunting”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita *stunting* umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Manusia

No	IKU	uan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				target	Realisasi		target	Realisasi	
1	Indeks pembangunan manusia	%	65,71	66,34	66,18	100	67,00	66,89	99,8
2	Prevelensi stunting	%	8,15	8,15	14,19	2,11	8	14,69	16,37
	Rata-Rata Capaian Kinerja					51%			58,08

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2023 dan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas kehidupan manusia tahun 2022 sebesar 58,08% **(Cukup)**.

- Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2022 pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 66,89. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2022 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2022, IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 5,41 yaitu dari 61,48 pada tahun 2014 menjadi 66,89 pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Dari tahun 2014 hingga 2022, IPM Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan secara rata-rata sebesar 1,06 % dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,68 disetiap tahunnya. Peningkatan IPM pada periode tahun tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik.

Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mamuju Tengah, 2014-2022



pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik karena :

1. Pembangunan manusia di Mamuju Tengah, terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 66.89. Rata rata peningkatan IPM setiap tahunnya sebesar 0,68 dengan rata-rata perkembangannya sebesar 1,06 %.
2. Peningkatan IPM di Mamuju Tengah disebabkan karena meningkatnya komponen/dimensi pembentuk IPM yaitu Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat), Dimensi Pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita)
3. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2014 -2022. Nilai tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 68,97 tahun, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,36 persen disetiap tahunnya dan rata-rata peningkatan disetiap tahun sebesar 0,25.
4. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2014- 2022. HLS pada tahun 2022 sebesar 12,63 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,50 persen di setiap tahunnya. Sedangkan RLS pada tahun 2022 sebesar 7,61 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,03 persen di setiap tahunnya.
5. Pengeluaran per Kapita Rill yang disesuaikan Mamuju Tengah pada 2022 adalah Rp 8,633 juta. Nilai ini mengalami peningkatan sejak tahun 2014- <https://mamujukab.bps.go.id> 42 2019 sebesar 1,040 juta rupiah, dan mengalami penurunan setelah pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Namun karena adanya pemulihan ekonomi, sehingga menyebabkan pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan meningkat sebesar 255 ribu di tahun 2022.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi

Kabupaten dan Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru		
	2020	2021	2022
Majene	66,91	67,29	67,84
Polewali Mandar	63,84	64,23	64,79
Mamasa	66,02	66,63	67,21
Mamuju	68,15	68,32	68,88
Pasangkayu	67,79	68,03	68,61
Mamuju Tengah	65,71	66,18	66,89
Sulawesi Barat	66,11	66,36	66,92
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat			

Showing 1 to 7 of 7 entries

- Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan prevalensi balita_stunting tertinggi kedua di Indonesia pada 2022. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita *stunting* di provinsi ini sebesar 35% pada tahun lalu Berikut prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat berdasarkan kabupaten/kota pada 2022:

Kabupaten Majene: 40,6%

Kabupaten Polewali Mandar: 39,3%

Kabupaten Mamasa: 38,6%

Kabupaten Mamuju: 33,8%

Kabupaten Mamuju Tengah: 28,1%

Kabupaten Pasangkayu: 25,8%

Strategi untuk mengatasi permasalahan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang Berlaku
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan
3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)
4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan
7. Penggerakan lintas sektor dan lintas program dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan
8. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat

3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten

Keberhasilan sasaran strategis “Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten” diukur dengan indikator kinerja utama berupa “Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar”. Dasar hukum utama untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Undang-Undang No.23 tahun 2014. Undang-Undang ini mengatur bahwa SPM merupakan Urusan Pemerintahan

Keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah” diukur dengan dua indikator kinerja utama berupa “Pertumbuhan ekonomi” dan “Tingkat pengangguran terbuka”. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,40	1,69	3,39	200,59	3,87	2,20	56,8
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,72	2,62	1,825	130,34	2,53	1,88	125,69
	Rata-Rata Capaian Kinerja					165			91,24

Capaian Kinerja pada indikator pertumbuhan ekonomi masih kurang dari target Karena kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa Masih kurang serta SDM yang minim.

Capaian Kinerja Pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Melebihi dari target karena Kabupaten Mamuju Tengah Maju dari sector Pertanian, lahan yang luas membutuhkan bnyak tenaga kerja dan rata-rata masyarakat Kab.Mamuju Tengah mayoritas adalah petani dan sudah memiliki lahan sehingga jumlah pengangguran dapat diredam

1. Lebih meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Peningkatan infrastruktur

3. Membina UMKM agar dapat berkembang dan bersaing

Gambar 3.7.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022

Tabel 12.4

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju Tengah (persen), 2018–2022

Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Mamuju Tengah Regency (percent), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	6,14	4,67	0,30	3,72	2,92
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6,25	4,02	-2,14	1,53	-0,30
C Industri Pengolahan/Manufacturing	9,23	11,44	-3,30	6,71	-1,62
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,43	5,47	3,19	2,83	6,98
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,44	8,64	2,09	-0,02	8,73
F Konstruksi/Construction	4,10	5,85	-11,71	6,65	-3,17
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,07	3,52	-2,87	1,52	0,68
H Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	3,21	7,80	-4,97	-1,52	4,85
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	6,03	9,07	-4,99	1,95	11,10
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5,17	6,75	4,49	0,13	2,73
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,59	5,09	4,87	8,00	-8,33

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estat/Real Estate Activities	2,37	3,49	1,39	-3,56	6,03
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	2,15	2,49	-4,89	0,29	4,74
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,97	4,24	-10,83	1,63	1,65
P Jasa Pendidikan/Education	1,63	3,19	-6,99	-1,58	1,76
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,90	5,79	1,40	1,67	-0,73
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	3,65	5,97	-2,13	2,30	5,59
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	5,72	5,21	-1,02	3,35	2,20

Catatan/Note:

*Angka sementara/ Preliminary figures

**Angka sangat sementara/ Very preliminary figures

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 tercatat sebesar 2,20 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Mamuju Tengah pada tahun 2022 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 11,10 persen. Begitupula jika ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR T yakni sebesar 6,8 persen.

Berikut data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah.

Gambar. 3.8. jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju Tengah, 2022
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Mamuju Tengah Regency, 2022

Catatan/Note:
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

yang mengalami kemiskinan kronis dengan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru, strategi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam tiga program yang langsung diarahkn kepada penduduk miskin yaitu:

- 1. Penyediaan kebutuhan pokok
- 2. Mengembangkan system jaminan social
- 3. Menegmbangkan budaya usaha
- 4. Memberikan Pendampingan dan Bantuan disektor pertanian

6. Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri

Keberhasilan sasaran strategis “Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri” diukur dengan indikator kinerja utama berupa “Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB”. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan Harga tahun 2010. Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	%	6,79	71,60	7,81	100,29	71,30	73,07	100,29

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian dalam PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 sebesar 73,07% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 71,30%. Sehingga capaian kinerja kontribusi sektor pertanian dalam PDRB di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 100,29% dengan kategori “ **Sangat Baik Sekali**”.Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Mamuju Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha merupakan yang tertinggi.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mendukung sector pertanian di kab.Mamuju Tengah dengan adanya investor dari luar yg masuk dan Bantuan-bantuan pertanian kepada Masyarakat.

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi sector pertanian dalam PDRB

- 1. Pengoptimalan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan

2. Pengembangan pola dan sistem pertanian, terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal.

Keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” diukur dengan 6 indikator kinerja utama berupa “Nilai LPPD”, “Indeks”, “Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)”, “Nilai SAKIP”, “Opini BPK”, “Indeks SPBE”. Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.

No	IKU	satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai LPPD	%	-	2,9	-	0	3	2,79	93
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	n/a	c	-	0	c	-	NA
3	Nilai SAKIP	%	c	c	c	100	c	cc	112
4	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
5	Indeks SPBE	%	0.0	0.0	0.0	0	1,8	1.83	102
	Rata- Rata Capaian Kinerja					40			101,75

Capaian Kinerja ini berhasil karena kerja sama lintas sector antara Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan kesadaran tentang Akuntabilitas Kinerja setiap Perangkat Daerah Kiat-kiat yg dilakukan salahsatunya dengan adanya Reward bagi OPD yang Patuh terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerjanya masing-masing.

8. Berkembangnya Inovasi Daerah

Keberhasilan sasaran strategis “Berkembangnya Inovasi Daerah” diukur dengan indikator kinerja utama berupa “Indeks inovasi daerah”. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan lptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan lptekin.

Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Berkembangnya Inovasi Daerah

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks inovasi daerah	%	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	100	Kurang Inovatif	Inovatif	105

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja indeks inovasi daerah yaitu 105% (**Sangat Baik Sekali**) inovatif dengan target yang telah ditetapkan kurang inovatif. Dari hasil capaian kinerja ini diharapkan akan menjadi langkah gebrakan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah kedepannya agar lebih baik.

Upaya-upaya yang dilakukan

1. Selalu menghasilkan inovasi-inovasi yang berkualitas yang tepat guna dan tepat sasaran
 2. Mengevaluasi terhadap inovasi yang diterapkan guna menyelaraskan perubahan dan kebutuhan Organisasi dan Masyarakat agar inovasi dapat mencapai sasaran
- Salah satu Inovasi yang dianggap berhasil yaitu MEMBARA (Membangun Rumah Rakyat) yang di buat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kab.Mamuju Tengah

9. Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis “Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat” diukur dengan indikator kinerja utama berupa “Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau setingkat provinsi adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.12.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	%	50	55	55	100	60	55	91,66

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis untuk Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan telah mencapai 91,66 % atau berkategori **"Baik Sekali"**. terkait dengan menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bukan tanpa kendala/permasalahan, kegiatan berupa sosialisasi, patroli hingga penertiban sering di galakan oleh Satpol PP dan Damkar khususnya anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan. Dari masalah terbatasnya anggaran, sarana kegiatan, dan terbatasnya SDM yang dimiliki, Namun dari semua itu sudah ada upaya-upaya yang lakukan untuk mengatasinya, antara lain memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan banyaknya kegiatan, memberdayakan sarana yang tersedia (melakukan perawatan), melakukan pelatihan internal, sosialisasi kepada anggota serta melakukan sinergitas antar instansi terkait dalam hal pengawasan dan ketentraman lingkungan. Tindakan berupa menyusun rencana sebagai hasil evaluasi dari permasalahan yang didapat di tahun ini adalah dengan menyusun rencana peningkatan anggaran guna mendukung program dan kegiatan Dinas Trantib dan Linmas Kab. Mamuju Tengah, mencoba untuk mengajukan penambahan sarana, pelatihan baik anggota trantibum lismas serta mengikuti anggota untuk melakukan Diklat PPNS. Kemudian mempererat kerjasama seluruh stakeholder dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap kenyamanan, ketentraman lingkungan serta ketertiban

10. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah

Keberhasilan sasaran strategis “Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah” diukur dengan indikator kinerja utama berupa “Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)” dan “Penurunan gas emisi rumah kaca”. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan

periode tertentu. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global dimana salah satu pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk itu, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia melakukan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan

berkeadilan. Tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	%	71,38	74,7	55	100	75,00	78,71	104,9
2	Penurunan gas emisi rumah kaca	%	n/a	2	-	0	2	0,01	0,5
	Rata-Rata Capaian Kinerja								52,7

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata – rata tingkat capaian kinerja Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah yaitu 52,7 % Kategori **“cukup”**

Capaian Kinerja ini tidak terlepas karena adanya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut dilaksanakan di 5 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan sasaran utama bagi usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang dimaksud ialah pabrik/perkebunan kelapa sawit, perbengkelan, pengelolaan kayu, pabrik pengelola gabah, dll yang dianggap berdampak pada lingkungan. Pemantau dilaksanakan guna untuk mencegah sedini mungkin kelalaian dari pengelola baik yang tidak disengaja ataupun mungkin karena kesengajaan pelaku usaha/kegiatan.

Tabel.3.14. CAPAIAN TAHUN 2022 DIBANDINGKAN TARGET RPJMD 2022

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD 2022	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	63	52	82,53
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia	67,00	66,89	99,8
		Prevelensi stunting	8%	14,69%	16,37
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	100	95,78	95,78
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	3,87	2,20	56,8
		Tingkat pengangguran terbuka	2,53	1,88	125,69
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	6,30	7,17	86,19
6	Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	71,30	73,07	100,29
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3	2,79	93
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	C	-	NA
		Nilai SAKIP	C	CC	112
		Opini BPK	WTP	WTP	100
		Indeks SPBE	1,8	1,83	102
8	Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kurang Inovatif	Inovatif	100
9	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	60	55%	91,66
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	75.00	78,71	104,9
		Penurunan gas emisi rumah kaca	2	0.01	0,5

Tabel.3.15. REALISASI ANGGARAN

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Program Penyelenggaraan jalan	Rp. 43.106.414.216,00	Rp. 22.820.535.686,00	52,94 %
Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia				NA
	Prevelensi stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 41,496,036,269,00	Rp. 36.999.161.513,00	88,47%
Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar				NA
Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi				NA
	Tingkat pengangguran terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 100.026.900	Rp. 99.986.900,00	100%
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 212,443,920,00	Rp. 203,333,790,00	96%
Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.1.083.722.609	Rp.681.435,650	52,62%
		Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.150.255,454	Rp.145.508,320	96,84%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan Dan kesejahteraan Rakyat	Rp.250.741.425	Rp.250.667.945	2,79
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Data Belum Rampung	Data Belum Rampung	NA
	Nilai SAKIP	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.343.873.175	Rp. 327.141.192	95,1
	Opini BPK				NA
	Indeks SPBE				NA

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Pengembangan Inovasib Dan Teknologi	Rp.270.432.655	Rp.270.409.678	99,99%
Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 368.736.000,00	Rp. 368.736.000,00	100%
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.735.650.000	Rp. 1.722.530.000	99,2%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.51.846.850	Rp.44.786.500	86,3%
	Penurunan gas emisi rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Rp. 105.541.250	Rp. 100.496.000	95,2%



Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (Tujuh Belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa :

1. sebanyak 6 Indikator dicapai dengan “sangat baik sekali”, 5 Indikator dicapai dengan kategori “baik sekali”, 1 Indikator dicapai dengan kategori “baik”, 1 Indikator dicapai dengan kategori “Cukup, 2 Indikator dicapai dengan kategori “Kurang, serta 1 Indikator tidak dapat dilakukan perhitungan tingkat capaiannya
2. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 85,4 %, dengan kategori “Baik Sekali”
3. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 dikategorikan Baik Sekali dan Jauh lebih Meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, Sudah Sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Mamuju Tengah, 30 Maret 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Poros Mamuju-Palu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan Kinerja Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, ditemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat tindak lanjut sesegera mungkin serta perbaikan guna penyempurnaan laporan. Namun hal tersebut tidak menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Topoyo, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

Sakaria K. S. Ag. M. Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19731010 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	IKU	SATUAN	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	%	63	52	82,53
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia	%	67,00	66,89	99,8
		Prevelensi stunting	%	8%	14,69%	16,37
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar	%	100	95,78	95,78
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	3,87	2,20	56,8
		Tingkat pengangguran terbuka	%	2,53	1,88	125,69
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	%	6,30	7,17	86,19
6	Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	%	71,30	73,07	100,29
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD		3	2,79	93
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		C	-	NA
		Nilai SAKIP		C	CC	112
		Opini BPK		WTP	WTP	100
		Indeks SPBE		1,8	1,83	102
8	Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah		Kurang Inovatif	Inovatif	100
9	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	%	60	55%	91,66
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	%	75.00	78,71	104,9
		Penurunan gas emisi rumah kaca	%	2	0.01	0,5

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp... ..dengan rincian Belanja Tidak langsung sebesar Rp..... Dan Belanja Langsung sebesar Rp.....

Mamuju Tengah 28 Februari 2023



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor : 007.1 / 256 / I / 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

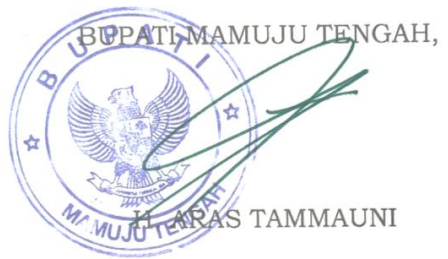
Nama : H. ARAS TAMMAUNI

Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju Tengah, 17 Januari 2022

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022 (RENCANA KERJA TAHUNAN)
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	74,8
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia	67,00
		Prevalensi stunting	8,00
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan standar	100
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	3,87
		Tingkat pengangguran terbuka	2,53
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	6,30
6	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	71,30
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	3
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	C
		Nilai SAKIP	CC
		Opini BPK	WTP
		Indeks SPBE	1,8
8	Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kurang Inovatif
9	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman	60
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	75,00
		Penurunan gas emisi rumah kaca	3

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 45.803.935.491
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 12.830.403.149
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 352.592.057
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 795.228.445
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 456.356.370
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 75.252.395.297
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 75.380.128.950
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 42.859.000
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 850.850.748
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 230.108.220
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.295.044.597
12	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.405.266.553
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 225.052.746.430
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.285.736.075
15	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 186.237.034

Mamuju Tengah, 17 Januari 2022

BUPATI MAMUJU TENGAH,

 H. ARAS TAMMAUNI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor : 5720 / 007.1 / X / 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ARAS TAMMAUNI

Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju Tengah, 25 Oktober 2022

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022 (RENCANA KERJA TAHUNAN)
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur daerah	74,8
2	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia	67,00
		Prevalensi stunting	8,00
3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten	Rata-rata capaian SPM pelayanan standar	100
4	Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	3,87
		Tingkat pengangguran terbuka	2,53
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	6,30
6	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	71,30
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	3
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	C
		Nilai SAKIP	CC
		Opini BPK	WTP
		Indeks SPBE	1,8
8	Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kurang Inovatif
9	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman	60
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	75,00
		Penurunan gas emisi rumah kaca	3

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 43.106.414.216
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 13.739.277.295
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 686.414.135
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 726.353.643
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 445.741.370
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 79.321.271.893
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 74.597.157.473
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 42.859.000
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 100.026.900
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 212.443.920
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.083.722.609
12	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.824.520.737
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 234.335.296.555
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 861.701.235
15	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 168.657.034

Mamuju Tengah, 25 Oktober 2022

BUPATI MAMUJU TENGAH,

 H. ARAS TAMMAUNI